

**PROPOSAL WRITING**

**LEMBAR PERSOALAN PARTISIPAN**

Saudara adalah Pejabat Administrator yang memiliki reputasi baik dan kompeten pada bidang kerja anda. Anda dipilih mewakili Perangkat Daerah untuk ditugaskan kedalam tim Satuan Tugas Gerak CEPAT guna menyelesaikan berbagai permasalahan sosial. Misi utama Saudara adalah menganalisa permasalahan berserta rekomendasinya dalam bentuk proposal. Mengingat provinsi Borneo Tenggara ini dalam kondisi yang genting, sehingga proposal anda diharapkan akan memberikan alternatif solusi terbaik.

Proposal yang Saudara ajukan diharapkan ***aplikatif dan spesifik mengenai 3 (tiga) permasalahan krusial*** yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, rekomendasi penyelesaian masalah dengan mengetengahkan terobosan-terobosan baru untuk Pemerintah Provinsi Borneo Tenggara serta kesimpulan dan saran. Tulisan hendaknya mengacu pada tatacara penulisan formal.

***Waktu yang Saudara miliki adalah 60 menit untuk menyusun proposal.***  
***Catatan : Penggunaan data, alamat, nama, karakter, waktu, tempat, masalah yang di gunakan pada simulasi ini terbatas pada kepentingan persoalan. Adanya persamaan merupakan kebetulan saja. Saudara dapat menggunakan semua sarana dan fasilitas yang tersedia di ruangan.***

**Potret Provinsi Borneo Tenggara dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan**

Provinsi Borneo Tenggara memiliki luas 125.342,94 km<sup>2</sup>, dengan Kabupaten/Kota dibawah koordinasi sebanyak 9 (Sembilan) daerah dengan aksesibilitas yang jauh serta topografi dan kontur yang cukup sulit karena terdiri dari sungai dan daratan yang struktur tanahnya rawa sehingga membutuhkan biaya tinggi untuk pembangunannya. Disisi lain masyarakat Provinsi Borneo Tenggara sangat membutuhkan infrastruktur yang mantap dan konektivitas antar daerah yang cepat.

Sumber daya alam Provinsi Borneo Tenggara sangar besar di sektor minyak, gas dan penggalian (Batubara, emas) serta dari sektor pertanian arti luas khususnya di sub sektor perkebunan dan kehutanan. Hal tersebut terlihat dari kontruibusi PDRB dari kedua sektor tersebut yang mendominasi hampir mencapai 70 persen dari struktur PDRB. Namun disisi lain dana bagi hasil dan DAU serta DAK tidak sesuai dengan besaran kontribusi bahkan cenderung menurun, sehingga pembiayaan pembangunan terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah dan kebutuhan pembangunan diberbagai sektor.

Jumlah penduduk Provinsi Borneo Tenggara sebanyak 3.808.235 jiwa yang tersebar diseluruh Wilayah baik yang ada diperkotaan, pinggir kota maupun di daerah pedalaman. Jumlah penduduk saat ini mengalami peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan yang diikuti juga dengan peningkatan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan dokumen Provinsi Borneo Tenggara Dalam Angka tahun 2022, dimana dari data tersebut terlihat adanya peningkatan angka kemiskinan dalam 3 (tiga ) tahun terakhir pada Wilayah Provinsi Borneo Tenggara. Jika dibandingkan pada tahun 20xx-2, dimana angka kemiskinan masih sebesar 5,91%, maka pada tahun 20xx-1 dan 20xx peningkatan angka kemiskinan telah menyentuh pada angka 6% dimana pada tahun 20xx-1 meningkat sebesar 6,64% dan 6,65% pada tahun 20xx. Berikut rincian datanya :

Tahun	20xx-2 (ribu)	20xx-1 (ribu)	20xx(ribu)
Jumlah Penduduk	3.721.400	3.766. 039	3.808.235
Jumlah Penduduk Miskin	220.910	230.026	241.077
Prosentase Peningkatan Penduduk Miskin	5,91%	6,64%	6,54%

Sumber : Provinsi Borneo Tenggara Dalam Angka Tahun 20xx-2, 20xx-1, 20xx.

Peningkatan angka kemiskinan ini dipengaruhi oleh masifnya penyebaran Virus Covid-19 yang bukan hanya diseluruh dunia tetapi juga di wilayah Borneo Tenggara. Hal tersebut berakibat pada menurunnya produktivitas diberbagai sektor dan bahkan mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional serta daerah provinsi Borneo Tenggara. Kondisi tersebut mempengaruhi banyak perusahaan yang mengurangi jumlah Pegawai dengan cara pemutusan hubungan kerja (PHK)

Pegawai sehingga angka pengangguran semakin meningkat, berdampak pada pendapatan masyarakat dan kemampuan daya beli masyarakat menurun.

Meningkatnya angka kemiskinan disebabkan juga oleh migrasi penduduk yang tidak disertai dengan skill yang dibutuhkan sehingga yang terjadi migrasi penduduk tersebut sulit mendapatkan pekerjaan dan sebaliknya menambah angka pengangguran dan kemiskinan di daerah tersebut semakin meningkat. Indikator kemiskinan tidak hanya terbatas pada kemampuan daya beli masyarakat saja tapi juga dengan banyaknya anak yang putus sekolah, banyaknya Ibu hamil dan menyusui yang tidak mampu banyaknya masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya serta keterbatasan fasilitas perumahan, kelompok tani/nelayan dan UMKM yang tidak mampu membeli berbagai kebutuhan untuk usahanya, serta ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses air bersih, kondisi fisik rumah yang tidak layak huni dan ketersediaan MCK yang terbatas dan tidak memenuhi standar, bahkan sebagian besar masyarakat memanfaatkan langsung MCK di pinggiran sungai sehingga menambah pencemaran air sungai serta indikator lainnya.

Disisi lain saat ini marak laporan baik dari masyarakat dan LSM terkait ketidaktepatan dalam penentuan sasaran kemiskinan, dimana ada indikasi Kepala Desa/Lurah/Camat yang lebih mengutamakan keluarganya yang mampu/tidak miskin untuk masuk pada daftar orang miskin/tidak mampu dari pada masyarakat yang benar-benar miskin dan tidak mampu yang tidak dimasukan oleh aparat desa/kelurahan/kecamatan kedalam data kemiskinan. Bahkan terdapat laporan kejadian dari Tim dari Instansi terkait yang melakukan survey validitas pada saat pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan untuk menentukan masyarakat miskin telah mendapat ancaman/tekanan/intervensi dari aparat atau masyarakat setempat untuk memaksakan mereka masuk dalam kategori masyarakat miskin/tidak mampu walaupun faktanya sebagian dari mereka aparat dan masyarakat mempunyai pekerjaan dengan pendapatan yang cukup tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan mereka.

### **Permasalahan Banjir Beserta Dampaknya**

Akhir-akhir ini kondisi terakhir provinsi Borneo Tenggara curah hujan dengan intensitas tinggi dan merata di berbagai wilayah Kabupaten dan Kota. Curah hujan yang tinggi dan dalam waktu yang lama, menjadi faktor utama terjadinya banjir, biasanya terjadi saat memasuki puncak musim hujan. Akibat hujan lebat, sungai menjadi meluap, selain itu minimnya daerah resapan air membuat air akan semakin tidak tertampung. Bukan hanya faktor alam yang menyebabkan bencana banjir namun juga ada faktor manusia yang menyebabkan bencana ini terjadi, dan hampir 70% banjir terjadi akibat ulah manusia. Pertumbuhan penduduk di Provinsi Borneo Tenggara semakin meningkat disertai dengan geliat dunia usaha yang semakin berkembang menimbulkan konsekuensi

adanya kebutuhan akan perumahan dan wadah untuk tempat usaha baik perdagangan maupun industri. Pertambahan penduduk tersebut disebabkan adanya pertumbuhan alamiah (kelahiran) juga karena adanya migrasi masuk, dimana penduduk yang masuk ke Provinsi Borneo Tenggara dengan maksud untuk mencari pekerjaan tanpa dibekali dengan skill yang dibutuhkan (*low skill*) oleh perusahaan menyebabkan pendatang tersebut menjadi pengangguran dan tidak mempunyai tempat tinggal sehingga banyak penduduk yang membuat tempat tinggal kurang layak di pinggiran sungai yang menyebabkan semakin berkembangnya permukiman kumuh.

Di Provinsi Borneo Tenggara telah terjadi kerusakan hutan dan pengalihan fungsi lahan yang menyebabkan potensi banjir, dimana hutan saat ini banyak ditebang pohonnya dan tidak mendapat perhatian penuh untuk reboisasi kembali. Terjadinya pengalihan fungsi lahan yang awalnya adalah lahan untuk pertanian/ perkebunan/ perumahan kemudian beralih menjadi lahan pertambangan. Dengan banjir yang terus terjadi dengan skala besar telah menyebabkan tanah longsor yang merusak rumah warga sekitar 300 rumah yang tertimpa longsor.

Bencana banjir Bandang yang disertai lumpur yang melanda Provinsi Borneo Tenggara tahun 202x ini adalah bencana yang paling besar dan telah memakan korban jiwa sekitar 783 orang serta kehilangan rumah dan harta benda lainnya sekitar 1.230 Kepala Keluarga dan kerusakan rumah yang terjadi sekitar 2.115 rumah, kerusakan areal persawahan sekitar 30.000 Ha dan areal Perkebunan 71.500 Ha serta kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan serta sekolah dan Puskesmas, apotik, pasar dan fasilitas layanan umum lainnya di beberapa wilayah lingkup Provinsi Borneo Tenggara. Banyak warga kehilangan keluarga/kerabatnya, anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan banyak juga orang tua yang kehilangan anaknya. Hal tersebut membuat kesedihan yang sangat memilukan melihat kondisi kejiwaan dan orang tua dan anak-anak yang kehilangan dan menimbulkan trauma yang cukup besar terhadap kejadian ini. Oleh sebab itu bencana banjir perlu diantisipasi untuk meminimalisir dampak dan resiko akibat bencana ini.

Dengan kehilangan dan rusaknya rumah/tempat tinggal menyebabkan banyak warga mengungsi ke daerah lain/kerumah keluarga/kerabat dan sebagian lagi ditampung di kamp pengungsian. Tenda-tenda penampungan pun sangat terbatas jumlahnya. Masyarakat yang berada di penampungan mulai terkena penyakit Infeksi Saluran Pernafasan dan penyakit kulit serta diare dan demam berdarah. Disisi lain jumlah tenaga PNS dan Honor yang bertugas pada Instansi terkait khususnya tenaga medis, jika dibandingkan dengan jumlah korban dan sangat luasnya area yang harus ditangani maka sangat terbatas jumlah dan kapasitasnya.

**Kemasyarakatan, Sosial dan Aparatur Pemerintah.**

Konflik sosial marak terjadi di beberapa waktu terakhir, terutama pasca Pemilihan Legislatif dan Pilkada serta konflik lainnya terkait dengan kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak pro rakyat atau tidak mengakomodir kepentingan sebagian warga.

Konflik pertanahan serta tambang juga cukup marak karena penduduk asli di Provinsi Borneo Tenggara merasa mereka berhak mendapatkan kesejahteraan dari kekayaan alam. Terlebih Provinsi Borneo Tenggara mempunyai kekayaan sumber daya alam yang cukup banyak jenisnya dan cukup besar sehingga menjadi daya tarik pendatang. Hal-hal tersebut memicu angka kejadian konflik semakin meningkat dan dikhawatirkan semakin tinggi di saat pesta demokrasi tahun 2024.

Hal tersebut terlihat dan semakin parah jika mengamati laporan dari Panitia Pengawas Pemilu, dimana saat ini ditemukan indikasi dari pelanggaran aturan, beberapa aparatur Sipil Negara menjadi Tim Sukses dari suatu Calon Legislatif dari Partai Republik dan partai lainnya. Bahkan telah ada laporan dari Panitia Pengawas Pemilu pada beberapa daerah di wilayah Provinsi Borneo Tenggara bahwa mereka telah mulai masif kampanye terselubung dan tersembunyi di beberapa Kecamatan/desa/kelurahan.

Aparatur Sipil Negara seharusnya dapat menjadi agen-agen perubahan mulai dari lingkup sederhana yaitu keluarga sampai dengan lingkup masyarakat yang lebih luas dalam kaitannya mempersatu bangsa atau mengantisipasi konflik. Oleh karena itu Sangat diperlukan strategi-strategi tertentu untuk dapat menanamkan jiwa kesatuan kepada aparatur negara agar dapat menjadi agen perubahan dan bukan malah terpengaruh memiliki sikap tidak toleransi, fanatisme ataupun diskriminatif.